

PERBUATAN MENJADIKAN DIRI SENDIRI MODEL PORNOGRAFI DAN
MENAWARKAN JASA PROSTITUSI SECARA DARING DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008

Nama : Christian Reynaldo

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : 1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

2. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah VA yang melakukan perbuatan menjadikan diri sendiri model pornografi dan menawarkan jasa prostitusi secara daring dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VA dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena VA telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 34 jo. Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Karena VA telah melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus sehingga masuk dalam perbarengan perbuatan pidana konkursus realis sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP.

Kata Kunci: Model Pornografi, Prostitusi, Konkursus Realis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

AN ACT OF MAKING HERSELVES AS A PORNOGRAPHY MODEL AND OFFERING AN ONLINE PROSTITUTION SERVICES BY THE LAW NUMBER 11 OF 2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS AS AMENDED BY THE LAW NUMBER 19 OF 2016 AND LAW NUMBER 44 OF 2008 CONCERNING PORNOGRAPHY

Name : Christian Reynaldo

Discipline/Study Programme : Law/Legal Studies

Advisors : 1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

2. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

ABSTRACT

This research aims to analyze whether VA criminally responsible for an act of making herself as a pornography model and offering an online prostitution services by the Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Law Number 19 of 2016 on the Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Law Number 44 of 2008 on Pornography. The result of this research shows that VA is criminally responsible for multiple criminal offences under Article 34 juncto Article 8 of Law No. 44 of 2008 and Article 45 (1) of Law No. 19 of 2016 juncto Article 27 (1) of Law No. 11 of 2008. VA's violation for 2 (two) criminal offences are considered conjunction of separate act under Article 65 of Indonesian Penal Code.

Key Word: Pornography Model, Prostitution, Conjunction of Seperate Act under Article 65 of Indonesian Penal Code, Law Number 44 of 2008 on Pornography, Law on Electronic Information and Transactions